

MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN IV

WAWASAN NUSANTARA (lanjutan)

1. KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

- Merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dan satu kesatuan ekonomi
- Satu kesatuan politik sebagai implementasi dalam kehidupan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Terwujud dalam pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat
- Satu kesatuan ekonomi sebagai implementasi dalam bidang ekonomi harus mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam memperhatikan kebutuhan masyarakat antara daerah timbal balik serta kelestariannya

2. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

- Dari bahasa Yunani, *geo* artinya bumi dan *politik* artinya politeia, kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara), *teia* artinya urusan
- Dalam bahasa Inggris, *politics* artinya serangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan
- Geopolitik pengaruh faktor geografi terhadap tindakan politik/negara
- Lemhanas 1997: Geopolitik Indonesia didasari ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga teori dan prakteknya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945
- Science: Ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara

3. WILAYAH TERITORIAL INDONESIA

- Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan politik negara tersebut
- Kondisi obyektif geografi nusantara, yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain
- Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih mengikuti *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939, dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai Pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan NKRI. Hal tersebut menimbulkan pergolakan-pergolakan
- Atas pertimbangan karena menimbulkan pergolakan, maka maklumkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957

- Deklarasi tersebut menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri
- Deklarasi ini juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial untuk melindungi kekayaan negara yang terkandung didalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
- Untuk mengukuhkan asas negara kepulauan ini ditetapkanlah Undang-Undang nomor 4/Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia
- Undang-undang tersebut tentang konsepsi nusantara yang berlandaskan semangat kekompakan dan mengacu pada konstelasi geografi RI sebagai negara kesatuan
- Muatan dalam UU No. 4/Prp tahun 1960, yaitu:
 - Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
 - Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 12 mil laut
 - Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar, sebagai yang dimaksud pada ayat 2
- Konsepsi nusantara mengilhami masing-masing angkatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan matryanya masing-masing, yaitu wawasan benua AD RI, wawasan bahari AL RI, Wawasan dirgantara AU RI. Untuk menghindari berkembangnya wawasan yang tidak menguntungkan karenamengancam kekompakan ABRI, disusunlah wawasan Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi. Wawasan Hankamnas merupakan hasil seminar Hankam I tahun 1966 dan diberi nama wawasan nusantara
- Wawasan nusantara merupakan konsepsi dalam memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia dimana perlu ada keserasian antara wawasan bahari, wawasan dirgantara, wawasan benua sebagai pengejawantahan segala dorongan (*motives*) dan rancangan (*drives*) dalam usaha mencapai aspirasi-aspirasi bangsa dan tujuan Negara Indonesia
- Wawasan bahari adalah wawasan masa depan yang merupakan suatu pandangan, salah satu aspek falsafah hidup satu bangsa di masa penggunaan dan penguasaan laut adalah mutlak untuk perkembangan kesejahteraan dan kekayaan negara serta bangsa di masa yang akan datang
- Raker Hankam tahun 1967 sepakat untuk menambahkan wawasan hankamnas dengan wawasan nusantara
- Pada November 1972 Lemhanmas meneliti dan mengkaji segala bahan dan datawawasan nusantara untuk sampai pada rumusan yang lebih terperinci agar dapat tegak sebagai wawasan nasional
- Pada tahun 1973, wawasan nusantara diangkat dalam ketetapan MPR RI No IV/MPR/1973 tentang GBHN dalam Bab II huruf E
- Perjuangan di dunia internasional untuk dikuinya wilayah nusantara sesuai dengan deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan rangkaian perjuangan yang cukup panjang. Dimulai sejak konferensi PBB, tentang hukum laut yang pertama pada tahun 1958, kemudian yang kedua pada tahun 1960 dan akhirnya pada konferensi ketiga pada tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (*United*

Nations Convention on the Law of The Sea atau konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut)

4. ASAS WAWASAN NUSANTARA

- Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk Bangsa Indonesia (suku bangsa dan golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tererai berainya bangsa dan negara Indonesia
- Asas wawasan nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Kepentingan yang sama: Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama Bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang Bangsa Indonesia harus mampu menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing, misalnya kehidupan dalam negeri Bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya
 - Keadilan yang artinya kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah
 - Kejujutan yang artinya keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu tidak enak didengar. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan
 - Solidaritas yang berarti diperlakukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing
 - Kerja sama artinya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik
 - Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah

apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan Bangsa Indonesia akan hancur berantakan pula. Ini berarti hilangnya Negara Kesatuan Indonesia

5. ARAH PANDANG

Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, konstelasi, geografi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang wawasan nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar:

- Arah pandang ke dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
- Arah pandang ke luar
Arah pandang ke luar bertujuan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap saling hormat menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945

6. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

A. Kedudukan

- Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional
- Wawasan nasional dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya, sebagai berikut:
 - Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil
 - Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional
 - Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan nisional
 - Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional

- GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional

B. FUNGSI

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

C. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, dan daerah

Kepentingan-kepentingan tersebut harus tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan dan terciptanya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa, bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara

7. SASARAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu Bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, implementasi dan penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan nusantarasesungguhnya berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:

1. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat

2. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Disamping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri
3. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, dan kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya
4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuhkan kebanggaan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi bentuk ancaman, sebarangpun kecilnya dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara

8. SOSIALISASI WAWASAN NUSANTARA

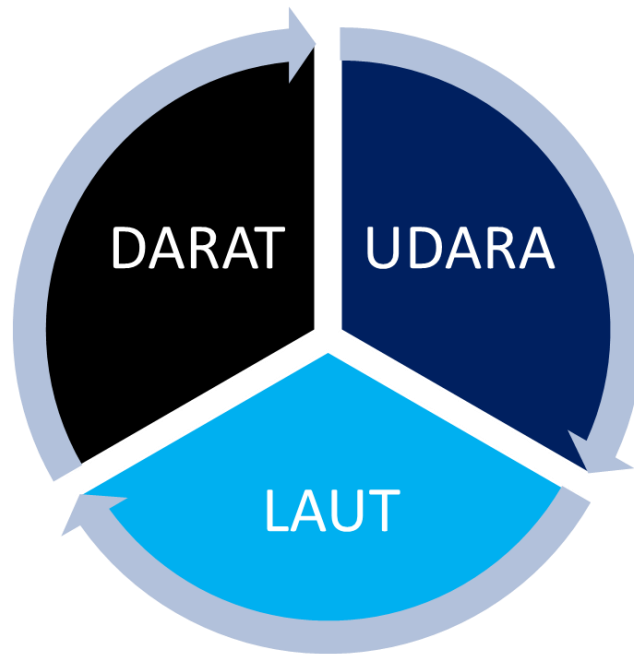
- Menurut sifat/cara penyampaiannya:

- Langsung: ceramah, diskusi, dialog, tatap muka
- Tidak langsung: media elektronik, media cetak, sosial media

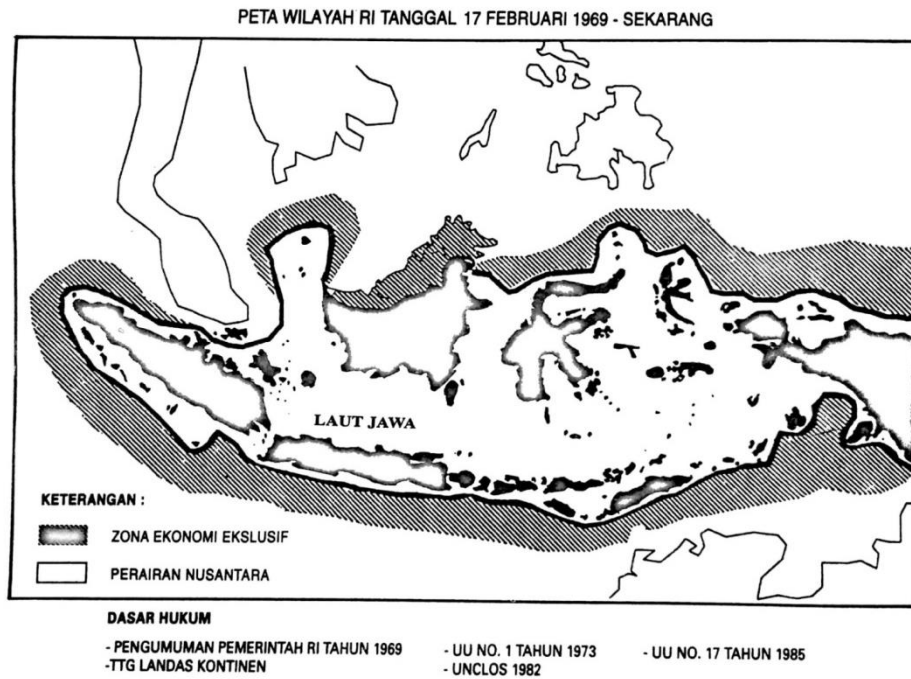
- Metode penyampaiannya:

- Keteladanan: Metode penulanan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh berpikir, bersikap, dan bertindak meningkatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air
- Edukasi: Metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah, keluarga, lingkungan permukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan
- Komunikasi: Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara

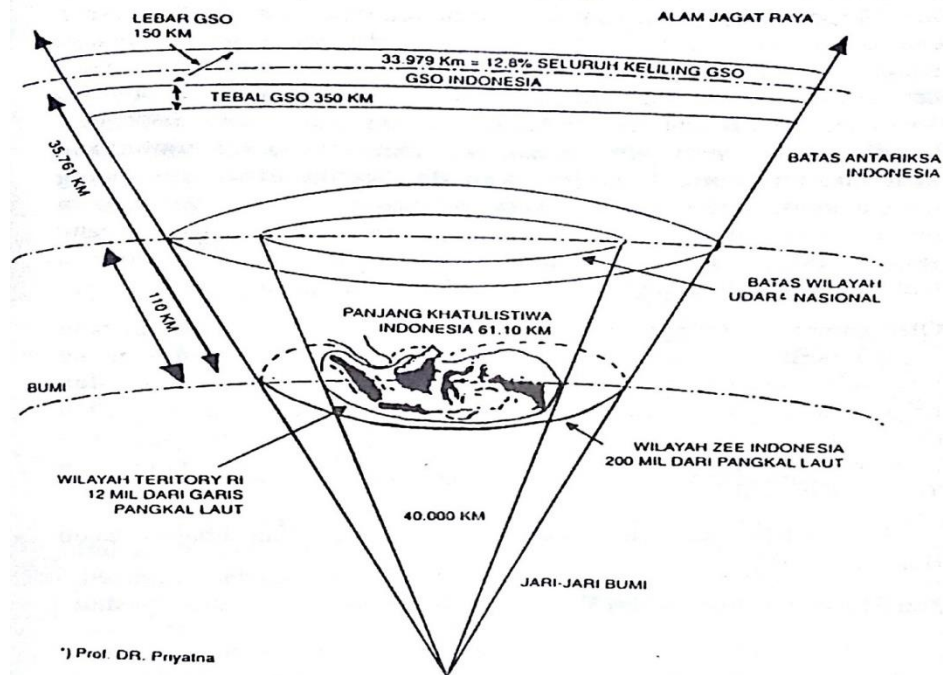
- Integrasi: tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Pengertian serta pemahaman tentang wawasan nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh Bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional



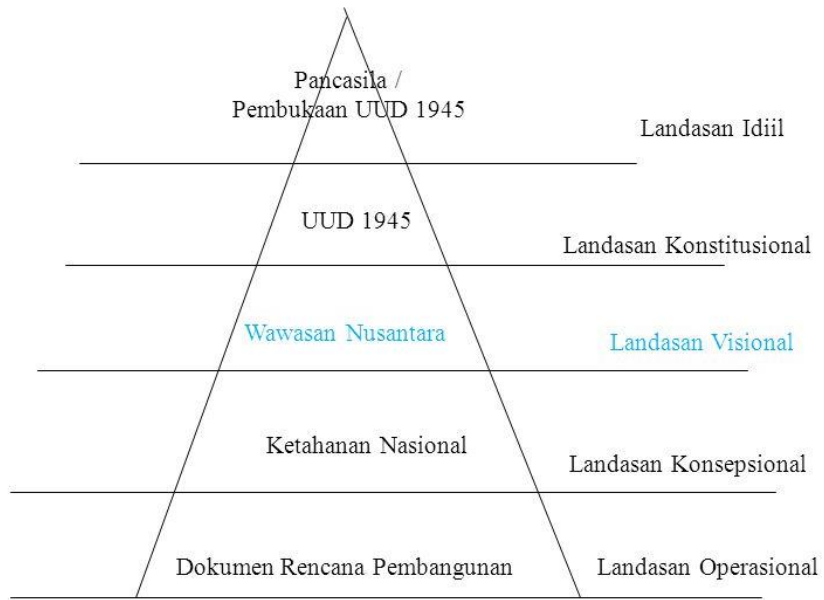
Gambar 1 Wilayah NKRI sebagai Kesatuan Darat, Laut, dan udara



Gambar 2 Peta Politik Wilayah RI dari Desember 1999 s/d Sekarang



Gambar 3 GSO Indonesia dan Batas Dirgantara Nasional



Gambar 4 Kedudukan Wawasan Nusantara